

Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan

Hayun Antarudin^{1*}, Asmiddin¹, La Didi¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: hayunantarudin@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 1 November 2025

Revised: 1 Desember 2025

Accepted: 31 Desember 2025

Abstrak

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama bagi daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya. Kabupaten Buton Selatan memiliki berbagai potensi pariwisata yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PAD masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengembangan pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan kuliner, tokoh masyarakat, akademisi, serta masyarakat sekitar destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berdampak positif terhadap PAD melalui retribusi tiket masuk, izin usaha pariwisata, parkir, serta aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Namun, dampak tersebut belum optimal akibat keterbatasan integrasi antara atraksi wisata, layanan, aksesibilitas, promosi, dan pengelolaan destinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yang terencana dan terpadu berpotensi meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan secara berkelanjutan.

Kata kunci: pariwisata daerah; pendapatan asli daerah; pengembangan pariwisata; ekonomi daerah

Abstract

The development of the tourism sector is one of the important strategies in increasing Regional Original Revenue (PAD), especially for areas that have natural and cultural tourism potential. South Buton Regency has various tourism potentials that have developed in recent years, but its contribution to PAD is still relatively limited. This study aims to analyze the impact of tourism development on the PAD of South Buton Regency through a qualitative approach. The research was conducted using a qualitative descriptive method through in-depth interviews, field observations, and documentation. The research informants include local governments, tourism and culinary business actors, community leaders, academics, and communities around tourist destinations. The results of the study show that tourism development has a positive impact on PAD through entrance ticket levies, tourism business licenses, parking, and other supporting economic activities. However, this impact has not been optimal due to limited integration between tourist attractions, services, accessibility, promotion, and destination management. This study concludes that planned and integrated tourism development has the potential to increase the contribution of the tourism sector to the South Buton Regency PAD in a sustainable manner.

Keywords: regional tourism; local revenue; tourism development; regional economy

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pariwisata telah berkembang menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian fiskal (Oates, 1999; Bahl, 2018). Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD adalah sektor pariwisata, karena mampu menciptakan sumber pendapatan langsung maupun tidak langsung melalui retribusi, pajak usaha, dan efek pengganda ekonomi (Spillane, 1991; Yoeti, 2006).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah. Arieska et al. (2022) dan Pratama dan Artha (2023) menemukan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Studi lain oleh Khairina dan Anggraini (2023) serta Wardia et al. (2024) menegaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan PAD di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan menempatkan pariwisata sebagai variabel ekonomi makro, sehingga belum menggambarkan secara mendalam bagaimana proses pengembangan pariwisata memengaruhi PAD di tingkat lokal.

Kabupaten Buton Selatan merupakan daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan religi yang beragam, seperti wisata bahari, pantai, pulau kecil, permandian alami, serta situs budaya dan sejarah. Potensi tersebut memberikan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata. Namun, berdasarkan temuan lapangan dan laporan pemerintah daerah, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan masih relatif rendah dan belum stabil.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pariwisata dan realisasi kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menganalisis dampak pengembangan pariwisata terhadap PAD secara kontekstual dan mendalam. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak pengembangan pariwisata terhadap PAD dengan menelaah langsung dinamika atraksi wisata, layanan, aksesibilitas, promosi, serta keterlibatan aktor lokal di Kabupaten Buton Selatan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengembangan pariwisata tidak hanya dipandang sebagai instrumen peningkatan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Mathieson dan Wall (1982) menegaskan bahwa pariwisata memiliki dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan, sehingga pengembangannya harus direncanakan secara komprehensif. Di tingkat daerah, pariwisata berperan sebagai sektor yang mampu menghubungkan sumber daya alam dan budaya dengan aktivitas ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat setempat.

Kabupaten Buton Selatan memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan potensi wisata bahari dan budaya yang relatif belum tereksplorasi secara masif. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan pariwisata daerah. Di satu sisi, keaslian alam dan budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan kapasitas pengelolaan destinasi menjadi kendala dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Hall (2008) menyatakan bahwa wilayah kepulauan dan daerah terpencil memerlukan strategi pengembangan pariwisata yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan, terutama dalam aspek aksesibilitas dan konektivitas.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan aktivitas wisata dan keterlibatan masyarakat, khususnya melalui pengelolaan destinasi berbasis komunitas dan BUMDes. Model ini sejalan dengan konsep *community-based tourism* yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan pariwisata (Suansri, 2003; Damanik & Weber, 2006). Namun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pariwisata berbasis komunitas sering kali menghadapi keterbatasan dalam aspek manajerial, promosi, dan integrasi dengan kebijakan daerah, sehingga dampaknya terhadap PAD belum optimal (Wibowo & Belia, 2023).

Dari perspektif fiskal daerah, PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian keuangan pemerintah daerah. Oates (1999) dan Shah (2005) menekankan bahwa daerah yang memiliki struktur PAD kuat cenderung lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, pariwisata dipandang sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, terutama melalui retribusi jasa wisata, pajak usaha, dan kontribusi sektor pendukung. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PAD sangat bergantung pada kualitas pengelolaan destinasi dan kebijakan daerah yang

mendukung integrasi sektor pariwisata dengan ekonomi lokal (Rahman et al., 2021; Jyotisa et al., 2023).

Sejumlah penelitian kuantitatif telah mengonfirmasi adanya hubungan positif antara pengembangan pariwisata dan peningkatan PAD di berbagai daerah di Indonesia (Arieska et al., 2022; Pratama & Artha, 2023; Wardia et al., 2024). Meskipun demikian, penelitian tersebut umumnya belum menjelaskan secara rinci bagaimana proses pengembangan pariwisata di tingkat destinasi memengaruhi PAD, terutama melalui perspektif aktor lokal dan praktik pengelolaan di lapangan. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme empiris yang menghubungkan pengembangan pariwisata dengan peningkatan PAD di daerah-daerah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai dampak pengembangan pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan strategi para pemangku kepentingan dalam mengelola pariwisata daerah. Dengan menganalisis secara mendalam dinamika pengembangan pariwisata dan kontribusinya terhadap PAD, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian empiris serta memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata dan Pembangunan Daerah

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah karena memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Yoeti (2006) menyatakan bahwa pariwisata adalah suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi, budaya, maupun pendidikan, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata. Dalam konteks pembangunan daerah, pariwisata dipandang sebagai sektor unggulan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun budaya.

Mathieson dan Wall (1982) menegaskan bahwa dampak pariwisata tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus direncanakan secara terpadu agar manfaat yang dihasilkan dapat berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Hall (2008) yang menyatakan bahwa perencanaan pariwisata merupakan proses multidimensional yang melibatkan kebijakan, aktor, serta hubungan antar sektor dalam suatu wilayah.

Pengembangan Pariwisata dan Atraksi Wisata

Atraksi wisata merupakan komponen utama dalam sistem kepariwisataan karena menjadi faktor penarik utama bagi wisatawan. Menurut Gunn (2002), atraksi wisata mencakup keindahan alam, warisan budaya, dan atraksi buatan yang dikemas untuk memberikan pengalaman kepada wisatawan. Keberadaan atraksi yang unik dan autentik menjadi keunggulan kompetitif suatu destinasi wisata. Konsep ini diperkuat oleh Ginting et al. (2020) yang menekankan pentingnya *distinctiveness* atau keunikan lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Dalam perspektif perilaku wisatawan, atraksi wisata berperan sebagai *pull factor* yang memengaruhi keputusan berkunjung ke suatu destinasi (Uysal & Jurowski, 1994). Atraksi yang memiliki nilai keindahan, keaslian, dan kekhasan budaya cenderung meningkatkan minat kunjungan wisatawan serta memperpanjang lama tinggal mereka di destinasi. Dengan demikian, pengembangan atraksi wisata yang berkualitas memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.

Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Keberlanjutan

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menjadi pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam pembangunan pariwisata daerah. Suansri (2003) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pariwisata. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Damanik dan Weber (2006) menegaskan bahwa pariwisata berbasis komunitas juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan lokal, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Tanpa dukungan tersebut, pariwisata berbasis masyarakat berisiko menghasilkan dampak ekonomi yang terbatas dan tidak berkelanjutan.

Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Oates (1999) menyatakan bahwa daerah dengan kapasitas PAD yang kuat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membiayai pembangunan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pariwisata dipandang sebagai salah satu sumber PAD potensial melalui retribusi jasa wisata, pajak usaha, dan aktivitas ekonomi pendukung lainnya (Bahl, 2018).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap PAD, meskipun besarnya bervariasi antar daerah. Arieska et al. (2022) menemukan bahwa pariwisata berkontribusi terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang, namun kontribusi tersebut masih relatif kecil dibandingkan sektor lainnya. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Pratama dan Artha (2023) serta Wardia et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa optimalisasi kontribusi pariwisata terhadap PAD memerlukan pengelolaan destinasi yang terintegrasi dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Kendala Optimalisasi Pariwisata terhadap PAD

Meskipun pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, berbagai kendala sering menghambat optimalisasi dampaknya. Hall (2008) dan Gunn (2002) menyoroti bahwa keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan aksesibilitas menjadi faktor utama yang menurunkan daya saing destinasi wisata. Selain itu, kelemahan tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga membatasi efektivitas pengelolaan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.

Bahl (2018) menegaskan bahwa optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, termasuk sistem pemungutan retribusi yang transparan dan akuntabel. Tanpa penguatan aspek tersebut, potensi ekonomi pariwisata cenderung tidak termanfaatkan secara maksimal, meskipun daerah memiliki daya tarik wisata yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak pengembangan pariwisata terhadap PAD melalui perspektif para pelaku dan pemangku kepentingan (Creswell, 2007; Moleong, 2016).

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Buton Selatan, khususnya pada destinasi wisata utama dan desa wisata yang aktif dikembangkan. Informan penelitian terdiri atas pejabat Dinas Pariwisata, pelaku usaha pariwisata dan kuliner, tokoh masyarakat, akademisi, serta masyarakat sekitar destinasi wisata. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengembangan pariwisata daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan bertumpu pada atraksi wisata alam dan budaya. Wisata bahari, pantai, pulau kecil, permandian alami, serta situs budaya dan religi menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kondisi ini sejalan dengan teori sistem pariwisata yang menempatkan atraksi sebagai komponen inti destinasi (Inskeep, 1991; Gunn, 2002).

Namun demikian, pengembangan pariwisata masih bersifat parsial. Beberapa destinasi telah dikelola oleh BUMDes dan kelompok sadar wisata, sementara destinasi lain masih berkembang secara mandiri dengan keterbatasan fasilitas dan layanan. Hal ini menyebabkan kualitas pengalaman wisatawan belum merata.

Dampak Pengembangan Atraksi Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengembangan pariwisata memberikan dampak positif terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan melalui retribusi tiket masuk, izin usaha pariwisata, parkir, serta penyelenggaraan event budaya dan wisata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Elpisah dan Suarlin (2020) serta Arieska et al. (2022) yang menyatakan bahwa pariwisata berkontribusi terhadap PAD baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain kontribusi langsung, pariwisata juga memberikan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan aktivitas usaha kuliner, transportasi lokal, homestay, dan jasa pendukung lainnya. Mathieson dan Wall (1982) menegaskan bahwa dampak ekonomi pariwisata tidak hanya diukur dari penerimaan langsung, tetapi juga dari perputaran ekonomi lokal yang ditimbulkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan atraksi wisata di Kabupaten Buton Selatan berperan sebagai fondasi utama dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atraksi wisata yang berbasis pada keunggulan alam bahari, budaya, dan Sejarah, seperti Waburi Park, Masjid Tua Wawoangi, Pantai La Poili, Pulau Ular, dan Permandian Kabura-Burana menjadi magnet utama kunjungan wisatawan. Temuan ini menguatkan pandangan Yoeti (2006) yang menyatakan bahwa daya tarik wisata merupakan elemen inti dalam sistem kepariwisataan karena menjadi alasan utama wisatawan melakukan perjalanan.

Secara teoritis, atraksi wisata berfungsi sebagai *pull factor* yang mendorong mobilitas wisatawan ke suatu destinasi (Uysal & Jurowski, 1994). Dalam konteks Buton Selatan, keaslian alam dan kekayaan budaya lokal menjadi faktor penarik yang kuat, terutama bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik dan berbeda dari destinasi massal. Hal ini sejalan dengan konsep *distinctiveness* dalam pariwisata berkelanjutan, yang menekankan pentingnya keunikan lokal sebagai keunggulan kompetitif destinasi (Ginting et al., 2020).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa potensi atraksi wisata tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan PAD yang optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan masih berada pada kisaran 5–7 persen. Temuan ini relatif sejalan dengan penelitian Arieska et al. (2022) dan Pratama dan Artha (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap PAD, besarnya masih terbatas apabila tidak diiringi dengan pengelolaan destinasi dan sistem retribusi yang terintegrasi.

Dari perspektif *tourism area life cycle* (TALC), kondisi pariwisata Buton Selatan dapat dikategorikan berada pada tahap *involvement* menuju *development* (Butler, 2017). Pada tahap ini, jumlah kunjungan mulai meningkat dan keterlibatan masyarakat lokal mulai terlihat, tetapi struktur pengelolaan dan infrastruktur belum sepenuhnya matang. Konsekuensinya, manfaat ekonomi termasuk kontribusi terhadap PAD belum sepenuhnya maksimal. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada keberadaan atraksi wisata, tetapi juga pada tahap perkembangan destinasi dan kualitas pengelolaannya.

Penelitian ini juga mengonfirmasi pentingnya keterpaduan antara atraksi wisata dan sektor pendukung lainnya. Fletcher et al. (2017) menekankan bahwa pariwisata merupakan sistem yang terdiri atas atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan layanan. Tanpa dukungan fasilitas, pelayanan, dan akses yang memadai, atraksi wisata cenderung hanya menghasilkan kunjungan singkat dengan tingkat belanja wisatawan yang rendah. Kondisi ini tercermin di Buton Selatan, di mana wisatawan umumnya menikmati atraksi alam dan budaya, tetapi belum banyak yang tinggal lebih lama atau membelanjakan pengeluaran secara signifikan di destinasi.

Dari sudut pandang fiskal daerah, temuan penelitian ini menguatkan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa optimalisasi PAD memerlukan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara efektif (Oates, 1999; Bahl, 2018). Pariwisata sebagai sektor berbasis sumber daya lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Namun, tanpa kebijakan retribusi yang jelas, mekanisme pencatatan pendapatan yang akuntabel, dan sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola destinasi, potensi tersebut sulit terwujud secara maksimal.

Jika dibandingkan dengan penelitian Nurul et al. (2025) di Kabupaten Gresik dan Wardia et al. (2024) di Nusa Tenggara Barat, temuan di Buton Selatan menunjukkan pola yang relatif serupa, yakni pariwisata berkontribusi positif terhadap PAD tetapi belum menjadi

sumber utama pendapatan daerah. Perbedaannya terletak pada konteks lokal dan tingkat kesiapan destinasi. Daerah dengan infrastruktur dan promosi yang lebih matang cenderung memperoleh kontribusi PAD yang lebih besar dari sektor pariwisata.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pengembangan atraksi wisata di Kabupaten Buton Selatan telah memberikan dampak awal terhadap peningkatan PAD, tetapi dampak tersebut masih bersifat terbatas dan belum optimal. Penguatan pengelolaan atraksi wisata secara terpadu, peningkatan kualitas destinasi, serta integrasi dengan kebijakan fiskal daerah menjadi prasyarat penting agar pariwisata dapat berfungsi sebagai penggerak utama peningkatan PAD dan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kendala Optimalisasi Dampak terhadap PAD

Meskipun berdampak positif, kontribusi pariwisata terhadap PAD masih belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan aksesibilitas, kualitas layanan yang belum merata, minimnya promosi terpadu, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Hall (2008) dan Fletcher et al. (2017) menegaskan bahwa tanpa dukungan layanan dan aksesibilitas yang memadai, destinasi wisata sulit memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Temuan ini juga memperkuat konsep *Tourist Area Life Cycle* (Butler, 2017), yang menunjukkan bahwa destinasi pada tahap awal pengembangan membutuhkan perencanaan dan investasi yang kuat agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Meskipun pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan potensi yang signifikan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala struktural yang menghambat optimalisasi kontribusinya terhadap PAD. Kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas, dan kualitas fasilitas wisata yang belum merata di seluruh destinasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya lama tinggal wisatawan dan terbatasnya tingkat pengeluaran selama berwisata, sehingga berdampak langsung pada kecilnya penerimaan retribusi dan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Gunn (2002) dan Hall (2008) yang menegaskan bahwa destinasi wisata yang tidak didukung oleh infrastruktur dan amenitas yang memadai cenderung hanya menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek dan berskala kecil.

Selain kendala fisik, aspek kelembagaan dan tata kelola juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Buton Selatan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam hal penetapan retribusi, pencatatan pendapatan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini menguatkan temuan Bahl (2018) dan Oates (1999) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal hanya akan efektif apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan daerah yang kuat. Tanpa penguatan tata kelola, promosi terpadu, dan sinergi antara pemerintah daerah, BUMDes, serta pelaku usaha, potensi pariwisata sebagai sumber PAD berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun memiliki daya tarik wisata yang tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui kontribusi langsung dan tidak langsung. Namun, dampak tersebut belum optimal akibat pengembangan pariwisata yang belum terpadu. Penguatan atraksi wisata perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, aksesibilitas, dan promosi terpadu. Pengembangan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan berpotensi meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Buton Selatan secara signifikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieska, A. A., Ansofino, A., & Deli, L. D. D. (2022). Analysis of tourism revenue contribution to regional original income and economic growth in Padang City. *Bisnis Indonesia: Journal of Economics, Management and Entrepreneurship*, 19–31.
- Bahl, R. W. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781786435309>

- Butler, R. W. (2017). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Tourism and Hospitality Research*, 17(2), 128–138. <https://doi.org/10.1177/1467358416631024>
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata: Dari teori ke aplikasi*. Pusat Studi Pariwisata UGM.
- Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2017). *Tourism: Principles and practice* (6th ed.). Pearson Education Limited.
- Ginting, N., Lathersia, R., Putri, R. A., & Ayu, P. (2020). Sustainable tourism based on distinctiveness: A theoretical review. *TALENTA Conference Series: Energy and Engineering*, 3(1). <https://doi.org/10.32734/ee.v3i1.870>
- Gunn, C. A. (2002). *Tourism planning* (4th ed.). Routledge.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism planning: Policies, processes and relationships*. Pearson/Prentice Hall.
- Jyotisa, I. M., Dwipatna, A., & Solihin, A. (2023). The role of tourism in achieving regional fiscal independence and community welfare. *Journal of Regional Development Studies*, 4(3), 1480–1492.
- Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Tourism: Economic, physical, and social impacts*. Longman.
- Nurul, F., Farahani, W., Pramudiana, I. D., & Ferriswara, D. (2025). Tourism sector development policy in increasing local income in Gresik Regency. *Journal of Regional Policy Studies*, 2(3), 74–89.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <http://www.jstor.org/stable/2564874>
- Pratama, K. P., & Artha, D. P. (2023). Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5, 93–104.
- Rahman, D., Ratna, S., & Dewi, S. (2021). Regional economic growth based on tourism, tax policy, and budget aspects. *Economic Development Review*, 24(2), 211–236.
- Suansri, P. (2003). *Community-based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tour.
- Uysal, M., & Jurowski, C. (1994). Testing the push and pull factors. *Annals of Tourism Research*, 21(4), 844–846. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)90091-4](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90091-4)
- Wardia, I., Ismiwati, B., & Wijimulawiani, B. S. (2024). Analysis of tourism sector impact on regional original income of West Nusa Tenggara Province. *Journal of Regional Economics*, 3(1), 74–81.
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Community participation in sustainable tourism development. *Journal of Tourism Studies*, 6(1), 25–32.
- Yoeti, O. A. (2006). *Pengantar ilmu pariwisata*. Angkasa.